

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR

R. Olivia Grecita Yolanda

Pembimbing : Dra. Lilik Pirmaningsih, Ak., M.Ak., CA.

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Indonesia

g-mail : yolandaolivia82@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur selama periode 2020-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan fokus pada seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur untuk tahun 2020-2022. Populasi penelitian mencakup 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang kemudian dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah judgement sampling. Data sampel yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan leverage memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Abstract

This study aims to present empirical evidence regarding the influence of local revenue, local government size, and leverage on the financial performance of local governments in the regencies/cities of East Java Province during the period of 2020-2022. The research uses a quantitative descriptive approach focusing on all regencies/cities in East Java. The data used are secondary data derived from audit reports on the financial statements of the regencies/cities in East Java for the years 2020-2022. The research population includes 38 regencies and cities in East Java, which were then used as the sample. The sampling technique employed is judgment sampling. The collected sample data were analyzed using SPSS version 20. The results of the study indicate that the variables of local revenue, local government size, and leverage have a positive influence on the financial performance of local governments. Therefore, it can be concluded that all independent variables in this study impact the financial performance of local governments.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia telah melalui berbagai fase penting yang mencerminkan perubahan politik, sosial, dan budaya negara ini. Krisis moneter serius yang terjadi pada akhir 1990-an menyebabkan depresiasi mata uang, inflasi tinggi, dan krisis keuangan yang parah. Reformasi besar-besaran pada tahun 1998 membawa perubahan politik dan reformasi ekonomi signifikan, termasuk penerapan kebijakan Otonomi Daerah untuk mengalihkan sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah. Langkah ini diharapkan dapat membantu daerah mendanai pembangunan dan layanan publik secara mandiri.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan transparan dan akuntabel, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005. Standar akuntansi pemerintah mengharuskan laporan keuangan menyajikan informasi secara lengkap dan berguna bagi pengguna, baik pada halaman utama laporan maupun dalam catatan atas laporan keuangan (CALK). Transparansi dan akuntabilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja keuangan daerah menjadi elemen penting dalam menilai bagaimana program berjalan, membandingkan layanan yang diberikan, dan berkomunikasi dengan publik. Namun, kinerja pemerintah daerah sering dinilai rendah karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta adanya kasus dugaan korupsi. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyatakan pentingnya pengukuran kinerja untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas layanan publik.

Informasi dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (LKPD) berguna untuk menilai performa keuangan dan meningkatkan program-program berikutnya. Evaluasi kinerja keuangan yang diperoleh dari laporan ini bisa meningkatkan kualitas layanan publik dan menarik minat investor. Pertumbuhan positif dalam nilai tambah pendapatan daerah akan memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya meningkatkan belanja modal pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah juga mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Total aset, sebagai indikator ukuran pemerintah daerah, menunjukkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki, semakin besar ukuran pemerintah daerah tersebut. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan untuk menilai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, ukuran pemerintah daerah, dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur?

2. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.
3. Mengetahui pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.

II. TUJUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai modal untuk membiayai pembangunan serta berbagai usaha daerah, sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Dengan meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi dan mengelola sumber daya yang ada, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada suntikan dana dari pusat. Semakin baik pengelolaan pemerintah daerah, semakin besar pembangunan dan perkembangan yang dapat dicapai, sehingga kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan meningkat, menandakan kinerja pemerintah yang semakin baik.

PAD mencakup semua pemasukan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dalam penelitian Sumarjo (2010), kemakmuran digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah, di mana pendapatan yang tinggi menunjukkan tingkat kemakmuran yang tinggi dibandingkan dengan daerah dengan PAD rendah. Kemakmuran suatu daerah juga mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintahannya. Desentralisasi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih memaksimalkan potensi mereka guna memperoleh PAD yang tinggi.

Halim (2012: 96-98) mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah dapat dikelompokkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

a. Pajak daerah

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah kewajiban individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung. Pajak ini dipungut secara paksa sesuai hukum dan digunakan

untuk mendanai aktivitas pemerintahan serta pembangunan daerah. Pajak daerah meliputi pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak tempat hiburan, yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai imbalan atas layanan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemda untuk kepentingan bersama.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebuah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan.

d. Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah

Pendapatan asli daerah yang sah dari sumber lain merupakan jenis pendapatan yang penerimaannya besar dari berbagai sumber milik pemda.

2. Ukuran Pemerintah Daerah

Banyak faktor yang bisa dijadikan sebagai indikator untuk penilaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya menggunakan Ukuran (*size*) dari pemerintah daerah itu sendiri. Patrick (2007) dalam penelitiannya menggunakan ukuran (*size*) sebagai salah satu variabel digunakan untuk menjelaskan struktur entitas. Sementara itu, Sudarmaji dan Sularto (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *size* sebuah perusahaan dapat diukur dengan total aset, arus penjualan, dan kapitalisasi pasar yang dimiliki. Mereka juga menyimpulkan bahwa semakin besar total aset sebuah perusahaan, maka semakin besar pula ukuran yang dimiliki perusahaan tersebut. Ada beberapa aspek yang bisa digunakan untuk mengukur ukuran pemerintah daerah :

- a. Anggaran dan keuangan
- b. Jumlah pegawai
- c. Luas wilayah dan penduduk
- d. Kinerja pelayanan publik
- e. Proyek infrastruktur
- f. Indeks kepuasan masyarakat
- g. Indeks transparansi dan akuntabilitas

3. Leverage

Choiriyah (2010) menyatakan bahwa *leverage* adalah rasio antara total hutang dan rata-rata ekuitas, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi *leverage* suatu entitas, semakin besar pula risikonya. Perwitasari (2010), dalam penelitiannya menyatakan bahwa *leverage* juga mencerminkan

sebuah struktur modal perusahaan yang dapat mempengaruhi tingkat risiko ketidakmampuan untuk melunasi utang.

Menurut Weill (2003) *leverage* digambarkan dengan besaran utang yang dimiliki pemerintah, berasal dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Dengan kata lain kinerja pemerintah dapat dikatakan buruk jika memiliki nilai *leverage* yang tinggi karena sumber pendanaannya bukan berasal dari modal yang dimiliki.

4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur keuangan daerah yang mencakup hak dan kewajiban daerah yang dinilai dengan uang serta segala hal yang dapat menjadi milik daerah, termasuk barang dan uang dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah merujuk pada semua hak serta kewajiban daerah yang dinilai dengan uang untuk menyelenggarakan program pemerintahan daerah.

Kinerja menurut Bastian (2006) adalah capaian pelaksanaan kegiatan atau program untuk mewujudkan tujuan, misi, dan visi organisasi atau entitas. Kinerja keuangan pemerintah mencakup penerimaan dan belanja daerah, digunakan dalam sistem keuangan yang ditetapkan dengan kebijakan dan ketentuan undang-undang selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan juga diukur melalui pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi dan misi melalui aspek keuangan dalam LKPD.

Pengukuran kinerja secara berkesinambungan dinilai penting untuk memberikan tanggapan yang memungkinkan pemerintah memperbaiki kinerja secara berlanjut demi mencapai tujuan masa depan. Evaluasi kinerja penting bagi lembaga profit maupun non-profit, untuk menilai kebijakan yang telah dilaksanakan dalam rangka pembangunan dan pelayanan publik, yang tercermin dalam LKPD. Penilaian kinerja dianggap krusial dalam menilai akuntabilitas suatu organisasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik.

B. Hipotesis

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Simanulla (2013) menjelaskan bahwa ada hubungan antara PAD dan kinerja pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Saraswati dan Rioni (2019) memproksikan Pendapatan Asli Daerah juga memiliki pengaruh yang Positif terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sumarjo (2010), Yulianingtyas (2011), dan Syafitri (2012), ukuran pemerintah daerah dinilai berdasarkan total aset yang dimilikinya. Ketika pemerintah daerah berukuran besar, hal ini dapat mempengaruhi operasionalnya dan mempermudah penyediaan layanan yang memadai kepada masyarakat. Selain itu, kemudahan operasional ini juga berdampak positif pada proses peningkatan PAD, yang berkontribusi pada kemajuan daerah sebagai tanda peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012).

Dengan kata lain, semakin besar ukuran pemerintah maka akan semakin baik juga kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah tersebut (Sumarjo, 2010). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

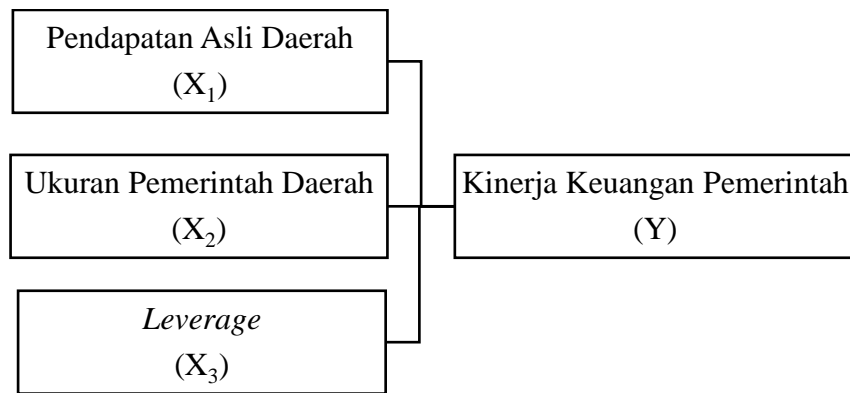
Sumarjo (2010) menyatakan bahwa rasio ini menunjukkan tingkat beban utang yang ditanggung oleh pemerintah daerah kepada pihak luar. Ketika *leverage* milik daerah tersebut kian tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari keuangan daerah tersebut semakin buruk. Yang artinya daerah tersebut tidak mampu membiayai kegiatannya sendiri dan memerlukan dana pinjaman dari pihak eksternal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

C. Model Analisis

Berdasarkan uraian diatas, berikut merupakan model dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Model Analisis

III. METODE PENELITIAN

A. Populasi Dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, sedangkan cara pengambilan sampel menggunakan judgement-sampling yang berarti memilih sampel terdapat 38 kabupaten/kota yang akan dijadikan sampel dalam penelitian dengan tahun amatan selama 3 tahun.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mempertimbangkan validitas dari data yang sudah dijamin oleh pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan-RI (BPK-RI) yang kemudian disebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dimana LHP dapat di akses melalui website resmi BPK-RI di www.e-ppid.bpk.go.id/PPID serta data lainnya diperoleh melalui website resmi lain.

B. Identifikasi Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah (X₁)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penghasilan yang dihasilkan dari berbagai sumber daya serta potensi yang ada di suatu daerah. Total PAD yang didapat dari laporan Realisasi Anggaran (LRA) kemudian dibagi dengan nilai yang sama untuk semua sampel yang ada.

2. Ukuran Pemerintah Daerah (X₂)

Proksi yang digunakan untuk mengukur variabel ukuran pemerintah daerah adalah total aset yang dibagi dengan angka yang sama pada seluruh sampel, yang diperoleh dalam laporan neraca daerah.

3. Leverage (X₃)

Menurut penelitian Sumarjo (2010), *leverage* adalah representasi dari total hutang dibandingkan dengan rata-rata ekuitas. Sementara itu, penelitian Weill (2003) menunjukkan bahwa *leverage* menggambarkan sejauh mana pemerintah memiliki kewajiban dari sumber eksternal dibandingkan

dengan modalnya sendiri. *Leverage* dapat diukur menggunakan rasio utang terhadap ekuitas (*Debt Equity Ratio*) dengan rumus :

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Kinerja keuangan pemerintah adalah kapasitas pemerintah dalam mencapai target dalam bidang pembangunan dan pelayanan publik, meliputi berbagai aspek seperti pendapatan daerah, pengeluaran daerah, defisit anggaran, dan utang daerah. Mardiasmo (2009:121) menggambarkan akuntabilitas tidak hanya menunjukkan bagaimana dana public digunakan, tetapi juga menunjukkan penggunaannya secara ekonomis, efektif dan efisien. Halim (2012: 232-241) dalam penelitiannya mengembangkan beberapa rasio, namun peneliti memilih melakukan penelitian menggunakan Rasio Efisiensi dalam pengukuran variabel dependen. Cara menghitungnya :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Pengeluaran}}{\text{Total Realisasi Pemasukan}}$$

C. Metode Analisi Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Pengelolaan data menggunakan program SPSS versi 20.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Ghozali (2006) menggambarkan statistik deskriptif dengan memperhitungkan mean, median, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dari sampel. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang distribusi dan karakteristik data sampel yang telah diterima.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis regresi berganda, karena melibatkan satu variabel dependen dan beberapa variabel independen (Sekaran, 2006). Sebelum melakukan analisis regresi berganda, peneliti perlu melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Berikut merupakan macam-macam uji dari uji asumsi klasik:

a. Uji Normalitas

Dalam model regresi, uji normalitas dipakai untuk memeriksa apakah variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Dalam pengujian, alat yang sering digunakan adalah uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Data dianggap memiliki distribusi normal jika probabilitasnya

lebih besar dari 0,05. Namun, jika probabilitasnya berada dibawah 0,05, maka data tersebut akan dianggap tidak terdistribusi secara normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengevaluasi apakah terdapat perbedaan varian antara residu dari satu pengamatan dengan residu dari pengamatan lainnya dalam satu model regresi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan uji Glejser dengan cara meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka terdapat masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menganalisis apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2005). Atau dengan kata lain, model regresi yang baik adalah saat dimana tidak terjadi adanya korelasi antar variabel independen. Terdapat cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pada uji multikolinieritas adalah dengan memeriksa faktor *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan TOL lebih dari 0,1, maka model regresi tersebut dianggap bebas dari multikolinieritas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat kecenderungan keterikatan antara nilai-nilai dalam suatu deret waktu. Autokorelasi muncul karena adanya keterikatan antara observasi yang berurutan sepanjang waktu. Model regresi yang ideal adalah model yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan uji *run test* dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala autokorelasi baik secara positif maupun negatif (Ghozali, 2005).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2016) tujuan dari penggunaan regresi linier berganda adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent serta untuk mengetahui besar dan arah pengaruh dari setiap variabel bebas tersebut. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Ukuran Pemerintah Daerah (X2), dan *Leverage* (X3) terhadap variabel terikatnya yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Analisis regresi linier berganda ini menggunakan bantuan *software SPSS* dengan persamaan regresi :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 α = Konstanta

β	= Koefisien regresi
b_1, b_2, b_3	= Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Leverage</i>
X_1	= Pendapatan Asli Daerah
X_2	= Ukuran Pemerintah Daerah
X_3	= <i>Leverage</i>

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F adalah metode yang digunakan untuk menentukan variabel independen dalam suatu model memiliki dampak yang sama terhadap variabel dependen. Dalam proses pengujian kelayakan data, uji statistik F diterapkan dengan syarat-syarat berikut: (1) Hasil pengujian menunjukkan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$. (2) Kriteria pengujian adalah jika $p\text{-value} < \alpha$, ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen, sedangkan jika $p\text{-value} > \alpha$, ini berarti sebaliknya (Ghozali, 2016).

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t adalah sebuah uji yang mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Terdapat beberapa kriteria dalam pengujian nilai, yaitu : (1) Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Dimana variabel independent tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. (2) Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Yang memiliki arti bahwa variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menentukan rentang dimana variabel bebas secara bersama-sama memberikan penjelasan terhadap variabel terikat apabila nilai R^2 berada di antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Koefisien determinasi bisa diartikan sebagai : (1) Jika nilai R^2 mendekati 1 berarti kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen kuat. (2) Ketika nilai R^2 mendekati 0, maka secara simultan menunjukkan bahwa kontribusi variabel independent terhadap variabel dependen semakin lemah (Ghozali, 2016).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	114	0,01318	0,53147	0,0555691	0,07691832
UPD	114	0,03265	0,94263	0,1078517	0,14306984
<i>Leverage</i>	114	0,00174	0,08490	0,138656	0,01538226
Kinerja Keuangan	114	1,65403	28,37950	5,9576344	3,62454831
Valid N (Listwise)	114				

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,22860833
Most Extreme Differences	Absolute	0,105
	Positive	0,105
	Negative	-0,077
Kolmogorov-Smirnov Z		1,122
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,161

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

Data akan dikatakan mempunyai distribusi normal saat nilai signifikansi $> 0,05$ dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka bisa dipastikan data tersebut tidak terdistribusi dengan normal. Berdasarkan table diatas, diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,161 yang lebih besar dari 0,05, artinya penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Sig
1	(Constant)	0,000
	PAD	0,663
	UPD	0,182
	<i>Leverage</i>	0,437

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui uji glejser dan dilakukan transformasi data dengan menggunakan metode logaritma natural di atas, menunjukkan bahwa nilai toleransi

dari masing-masing variabel sebesar $>0,05$ dimana Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,663, Ukuran Pemerintah Daerah (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,182, dan *Leverage* (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,437 yang artinya dari ketiga variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinierity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	0,111	8,978
	UPD	0,111	8,993
	<i>Leverage</i>	0,994	1,006

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

Dari hasil penelitian diatas masing-masing variabel memiliki $VIF < 10$ dan *tolerance value* $> 0,1$, dimana Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki nilai VIF sebesar 8,973 < 10 dan *tolerance value* sebesar 0,111 $> 0,1$, Ukuran Pemerintah Daerah (X2) memiliki nilai VIF sebesar 8,993 < 10 dan *tolerance value* sebesar 0,111 $> 0,1$, dan *Leverage* (X3) memiliki nilai VIF sebesar 1,003 < 10 dan *tolerance value* sebesar 0,994 $> 0,1$. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari Multikolinieritas.

d. Uji Autokolerasi

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokolerasi

Model	Durbin-Watson
1	1,011

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

Setelah dilakukan penelitian maka diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,011. Data akan dianggap bebas Autokolerasi jika $DU < DW < 4-DU$. Diperoleh $1,7677 < 1,011 < 4-1,7488$ maka disimpulkan bahwa data tersebut bebas dari autokolerasi.

3. Analisi Regresi Linier Berganda

Tabel 4. 6 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coeffients
		B
1	(Constant)	5,869

	Pendapatan Asli Daerah	-109,324
	Ukuran Pemeritah Daerah	53,107
	<i>Leverage</i>	31,470

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$= 5,869 - 109,324 + 53,107 + 31,470$$

4. Uji Hipotesis

a. Uji F (Simultan)

Tabel 4. 7 Hasil Uji F Simultan

Model		F	Sig
1	(Constant)	60,320	0,000 ^b
	Pendapatan Asli Daerah		
	Ukuran Pemerintah Daerah		
	<i>Leverage</i>		

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.7 di atas diperoleh bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan f hitung sebesar 60,320, maka Pendidikan Asli Daerah (X1), Ukuran Pemerintah Daerah (X2), dan *Leverage* (X3) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

b. Uji t

Tabel 4. 8 Hasil Uji t Parsial

Model		t	Sig
1	(Constant)	17,553	0,000
	Pendapatan Asli Daerah	-13,208	0,000
	Ukuran Pemerintah Daerah	11,924	0,000
	<i>Leverage</i>	2,272	0,025

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

PAD memiliki nilai sig. 0,000 dan t hitung -13,208 dengan ini PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. UPD memiliki nilai sig. 0,000 dan t hitung 11,924 dengan ini UPD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Leverage* memiliki nilai sig. 0,025 dan t hitung 2,272 dengan ini *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

c. Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Tabel 4. 9 Hasil Uji Determinasi

Model	R Square
1	0,622

Sumber : Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai R square sebesar 0,622 hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1), Ukuran Pemerintah Daerah (X2), dan *Leverage* (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebesar 62,2%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen sebesar 62,2%. Sementara itu, sisanya sebesar 37,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Pengaruh pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu elemen dari kemandirian daerah, sehingga harus selalu didorong pertumbuhannya (Halim, 2004). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah (X1) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) dimana tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai t dari variabel pendapatan asli daerah sebesar -13,208 dan memiliki nilai sig. sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

2. Pengaruh Ukuran Pemerintah daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran pemerintah daerah diwakili oleh total asset yang dimiliki, yang digunakan sebagai indikator kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa ukuran pemerintah daerah (X2) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) dimana tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai t dari variabel ukuran pemerintah daerah sebesar 11,924 dan memiliki nilai sig. sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah terbukti benar.

3. Pengaruh Leverage Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa *leverage* (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Dimana tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai t dari variabel *leverage* sebesar 2,272 dengan nilai sig. sebesar 0,025 yang lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dengan demikian hipotesis ke tiga dalam penelitian ini diterima.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dapat diambil kesimpulan bahwa : Seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima dan berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan hasil nilai signifikan dari uji t sebesar 0,000, yang berarti pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan hasil nilai signifikan dari uji t sebesar 0,000, yang berarti ukuran pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan hasil nilai signifikansi dari uji t sebesar 0,025, yang berarti *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

B. Saran

Diharapkan pemerintah terkait dapat memberikan sistem informasi yang lebih terpadu. Tidak hanya melalui *website* dan *call center whatsapp* saja namun bisa melalui layanan telepon seluler atau di sosial media. Dengan melakukan kampanye secara aktif dengan menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah masing-masing disesuaikan dengan tujuan permintaan data tersebut.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menggunakan variabel lain yang dapat memberikan dampak dan masukan kepada pemerintah dan masyarakat. Misal dengan menambahkan ukuran legislative sebagai tambahan variabel independen. Menurut Sumarjo (2010) ukuran legislatif sangat penting karena DPRD merupakan perwakilan dari warga biasa yang dipilih, untuk mewakili rakyat dalam memperjuangkan haknya. Dalam pelayanan yang diberikan

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, M. (2008). "Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah". Jurnal Ekonomi dan Pembangunan.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Fitriyanti, N., & Pratolo, S. (2009). "Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Daerah". Jurnal Ekonomi Pembangunan.

- Handra, H., & Maryati, E. (2009). "Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Halim, A. (2013). "Manajemen Keuangan Daerah". Jakarta: Salemba Empat.
- Jurnawati, J., et al. (2013). "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi Publik*.
- Lesmana, F. (2010). "Ukuran Pemerintah Daerah dan Kinerja Keuangan". *Jurnal Manajemen Keuangan*.
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Simanullang, D. (2013). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah". *Jurnal Ek*.
- Sudarmadji, A and Lana S. (2007). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan*. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil). Gunadarma University. *Jurnal*. Vol.2. ISSN: 1858-2559.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Weill, Laurent. 2003. *Leverage And Corporate Performance: A Frontier Efficiency Analysis On European Countries*. Working Paper Series. SSRN May.